

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**2021**  
—  
**2026**

**DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN WAY KANAN**

Jl. Radin Jambat No. 63, Blambangan Umpu, Way Kanan.  
[www. Dinasperikanan.waykanankab.go.id](http://www.Dinasperikanan.waykanankab.go.id)  
[perikananwaykanan@yahoo.com](mailto:perikananwaykanan@yahoo.com) ,

## KATA PENGANTAR

Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada Tim Penyusun Renstra untuk menyelesaikan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 ini.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan buku Renstra ini masih terdapat sejumlah kekurangan. Masih banyak keterbatasan dalam menyikapi permasalahan serta isu strategis yang berkembang menjadikan penyusunan Renstra ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, saran, kritik, dan masukan lain yang membangun sangat diharapkan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat di dalam penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 baik pikiran, tenaga, dan waktu. Semoga dokumen ini bisa digunakan sebagai bahan kajian, informasi serta sebagai acuan kegiatan tahun yang akan datang.

Blambangan Umpu,

2021

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Way Kanan



Drs. KADARSYAH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690918 199003 1 006

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	2
1.3. Maksud Dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi.....	6
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah .....	25
2.2.1. Sumberdaya Alam .....	25
2.2.2. Sumberdaya Aparatur .....	26
2.2.3. Sarana Pendukung .....	27
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	28
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	40
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan .....	43
3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	44
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Lampung .....	47
3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan .....	47
3.3.2. Telaah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung .....	49
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	54
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	55
<b>BAB IV TUJUAN, SASARAN</b>	
4.1. Tujuan Dan Sasaran .....	57
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....	60
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
6.1. Program dan Kegiatan .....	67
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>70</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nama Sungai dan Daerah Alir Kabupaten Way Kanan .....	25
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan .....	26
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	26
Tabel 2.4 Aset yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan ..	27
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan (T-C.23) .....	29
Tabel 2.6. Gambaran Ketersediaan Ikan dan Kebutuhan Ikan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 .....	38
Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan (T-C.24) .....	39
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	43
Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	45
Tabel 3.3. Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota Terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L .....	51
Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	53
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (T-C 25) .....	58
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (T-C 26) .....	61
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (T-C 28) .....	74

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan .....	8
Gambar 2. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Way Kanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016 –2020 .....	31
Gambar 3. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Way Kanan Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020 .....	32
Gambar 4. Peranan dan Pertumbuhan Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (persen), 2016-2020 .....	33
Gambar 5. Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 (ton) .....	34
Gambar 6. Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 (ton) .....	35
Gambar 7. Konsumsi Ikan per Kapita Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 (kg/kap/th) .....	37

**1.1. LATAR BELAKANG**

Renstra satuan kerja merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan isu-isu permasalahan strategis pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan serta program-program strategis yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana, bertahap dan mempunyai tolak ukur serta target pencapaian kinerja yang jelas melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan.

Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2021 - 2026 Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan merupakan turunan/penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih dan merupakan pedoman perencanaan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan dalam penentuan rencana kinerja tahunan termasuk target/indikator kinerja dan alokasi anggaran.

Pada September 2014, Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menggantikan UU nomor 32 Tahun 2004. Salah satu perubahan besar dalam Undang-Undang tersebut adalah pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi, termasuk kewenangan dibidang kelautan, Perikanan dan pengawasan. Tindak lanjut dari pemberlakuan Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah menyusun tahapan dan tatacara sesuai dengan Pemandagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 14 dilakukan berbasis pada e-planning. Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi dalam sistem informasi pemerintah daerah (SIPD).

## **1.2. DASAR HUKUM**

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi informasi pemerintah daerah (SIPD);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Pemendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi informasi pemerintah daerah (SIPD);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu disusun Standar Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129);



17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 141);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan Perikanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan pada periode 5 (lima) tahun kedepan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan secara umum kondisi bidang perikanan di Kabupaten Way Kanan sekaligus menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 - 2026;
2. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan;
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 - 2026 disusun mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan Dan Perikanan
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Way Kanan
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN, SASARAN**

- 4.1. Tujuan Dan Sasaran

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**

### **LAMPIRAN**

## **BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

---

### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perikanan memiliki tugas pokok, yaitu Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan mempunyai fungsi :

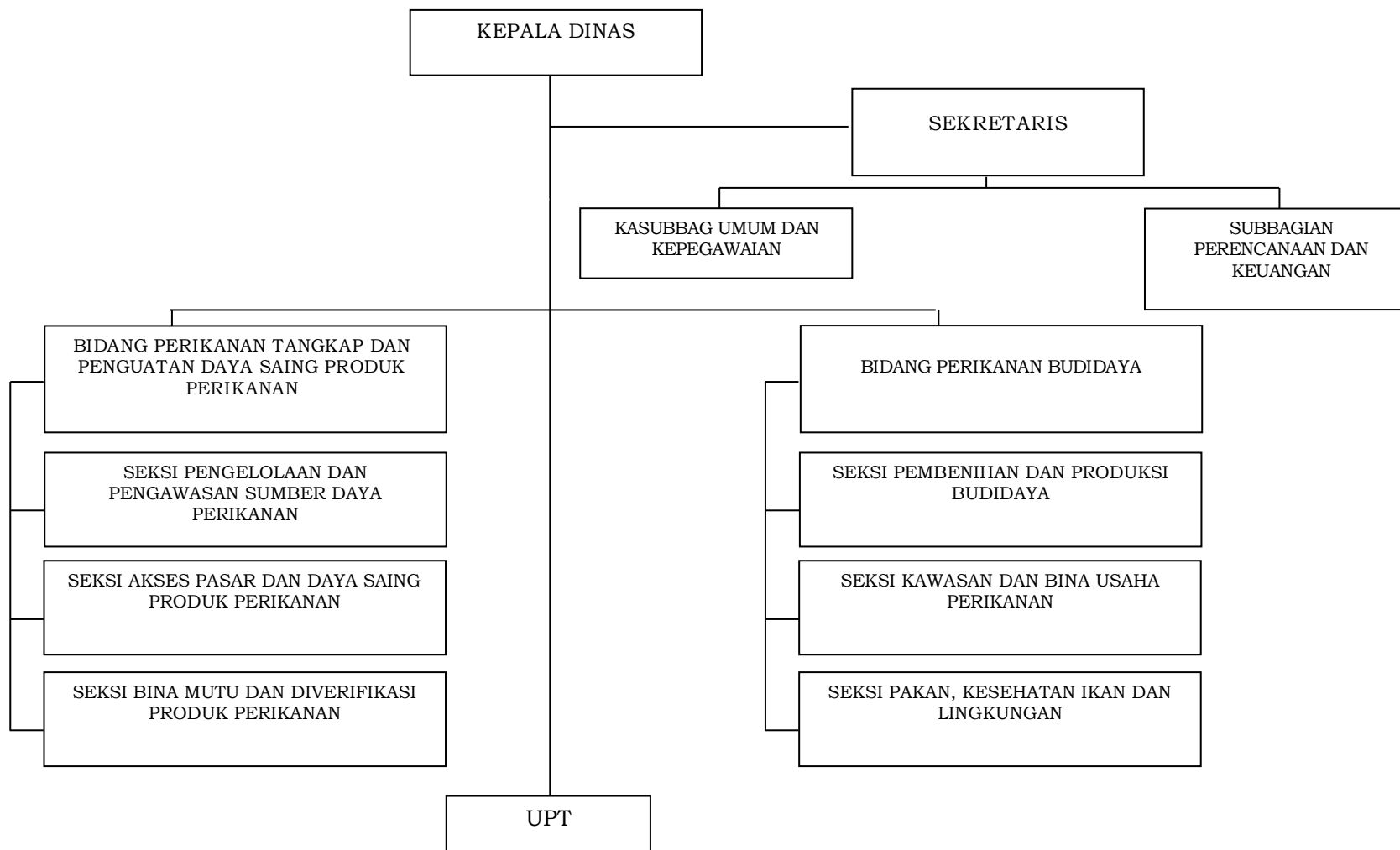
1. Perumusan kebijakan di bidang Perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perikanan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Struktur organisasi pada Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

- c. Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, membawahi :
  - 1. Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
  - 2. Seksi Akses Pasar dan Daya Saing Produk Perikanan; dan
  - 3. Seksi Bina Mutu dan Diverifikasi Produk Perikanan.
- d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
  - 1. Seksi Pembenihan dan Produksi Budidaya;
  - 2. Seksi Kawasan dan Bina Usaha Perikanan; dan
  - 3. Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Balai Benih Banjir.

Gambar 1 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan



Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan diatur dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan. Uraian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perikanan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan lainnya yang diberikan kepada Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam wilayah Kabupaten dan pengelolaan pembudidaya ikan;
- b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam wilayah Kabupaten dan pengelolaan pembudidaya ikan;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis yang telah digariskan dengan berpedoman pada kebijakan Bupati Way Kanan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral maupun vertikal terhadap instansi terkait dalam kegiatan perikanan dan kelautan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang perikanan kepada Bupati Way Kanan, dalam bentuk Laporan Tahunan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- f. Mengoordinasikan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis;

- g. Membina, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas bagian dan bidang agar dapat berjalan secara sinergis dalam mewujudkan renstra yang telah ditetapkan;
- h. Menilai bawahan dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk bahan pengembangan karir bawahan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **2. Sekretaris**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang terpadu;
- c. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif dinas;
- d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
- h. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- i. Penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas;
- j. Penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- l. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

- m. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat, membawahi:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga dan pencatatan aset serta administrasi kepegawaian di Lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumah tanggaan serta administrasi kepegawaian;
- b. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
- d. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di Lingkungan dinas;
- e. Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- g. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;



- h. Melaksanakan dan pelayanan hubungan masyarakat;
- i. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- j. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
- k. Melaksanakan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Dinas;
- l. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan dinas;
- m. Menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Dinas;
- n. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- p. Menyusun dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- q. Menyusun dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- r. Menyusun dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- s. Memfasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- t. Menyusun dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
- u. Mengoordinasikan penyusunan administrasi Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- w. Melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas; dan
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan Dinas serta penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangandan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas serta pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
- b. Menyusun rencana operasional dan mengkoordinasikan kegiatan dan program kerja Dinas
- c. Menyusun rencana strategis Dinas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Dinas;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas;
- g. Mempersiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- h. Melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- i. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
- j. Melaksanakan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
- k. Melaksanakan perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
- l. Melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;

- m. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- n. Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- o. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas;
- p. Melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
- q. Melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas;
- r. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik Dinas;
- s. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- t. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- u. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- v. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

### **3. Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan**

Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
- b. Perencanaan operasional di bidang perikanan tangkap dan penguatan daya saing produk perikanan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan dinas teknis terkait pengawasan sumberdaya kelautan, pengelolaan dan penangkapan hasil perairan umum;
- d. Pelaksanaan pembinaan kepada nelayan perairan umum;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan memfasilitasi usaha penangkapan di perairan umum;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada peralatan penangkapan ikan;
- g. Pelaksanaan pembinaan, kelembagaan dan register kelompok pengolahan ikan, pendataan pelaku pengolahan dan pemasaran ikan perorangan, serta Unit Pengolah Ikan (UPI);
- h. Penyelia dan memberikan rekomendasi permohonan izin usaha pengolahan hasil perikanan yang berskala memerlukan izin usaha;
- i. Perencanaan pembinaan dan pemantauan manajemen usaha dan fasilitasi permodalan dan pengembangan usaha dengan instansi/pihak terkait;
- j. Fasilitasi promosi, diversifikasi dan mutu produk serta standarisasi hasil olahan perikanan;
- k. Penyelia produksi dan ketersediaan/cadangan pangan hewani asal ikan yang dibutuhkan penduduk sehingga ketahanan pangan dapat terwujud;
- l. Pelaksanaan evaluasi, pengaturan dan menyelia sistem ketahanan pangan dan penerapan standar teknis distribusi pangan asal ikan;
- m. Pelaksanaan inisiasi dan fasilitasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) dan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Kabupaten Way Kanan;
- n. Pemberian petunjuk kelembagaan, manajemen, analisa usaha tani, dan kemitraan dalam rangka ketahanan pangan;
- o. Pengumpulan, menganalisis, memeriksa dan menyebarluaskan informasi perikanan dalam rangka ketahanan pangan;

- p. Perencanaan penerapan standar teknis distribusi pangan asal ikan serta memantau pemanfaatan bahan pangan asal ikan dan hasil rekayasa genetika;
- q. Inventarisasi usaha dan produksi pengolahan hasil perikanan serta membuat profil usaha perikanan yang ada di wilayah Kabupaten Way Kanan;
- r. Pelaksanaan sosialisasi peraturan kemitraan serta menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kemitraan usaha;
- s. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang untuk bahan evaluasi atasan dalam pengambilan keputusan; dan
- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, membawahi :

- a. Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
- b. Seksi Akses Pasar dan Daya Saing Produk Perikanan; dan
- c. Seksi Bina Mutu dan Diverifikasi Produk Perikanan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.

- a. Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan program di bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan sebagai pedoman dalam melaksanakan

tugas;

- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap sumber daya perairan umum agar kualitas sumber daya bebas dari pencemaran, aman dan lestari;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta informasi data statistik perikanan tangkap;
- d. Melaksanakan pendataan dan menginventarisir penggunaan alat tangkap yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aktifitas penangkapan ikan oleh Nelayan Perairan Umum, agar tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- e. Merencanakan dan membuat program berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan dan pengendalian sumber daya perairan Umum;
- f. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, penyuluhan dan pelayanan terhadap masyarakat perikanan tangkap;
- g. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan;
- h. Mengidentifikasi dan menata wilayah perikanan tangkap/fishing ground;
- i. Melaksanakan digunakan nelayan perairan umum;
- j. Menginventarisir dan melaksanakan pendataan nelayan perairan umum, sebagai bahan pembuatan database nelayan dan pembuatan kartu nelayan;
- k. Melaksanakan pembinaan dan kelembagaan kelompok-kelompok nelayan, Pokmaswas, dan KUB;
- l. Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan;
- m. Melaksanakan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya perikanan;
- n. Melaksanakan pembinaan teknis kepada nelayan, memfasilitasi kartu asuransi nelayan, dan program pendukung untuk nelayan lainnya;
- o. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan untuk bahan evaluasi atasan dalam pengambilan keputusan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- b. Seksi Akses Pasar dan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan program di bidang akses pasar dan promosi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Akses Pasar dan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Akses Pasar dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Menyiapkan bahan, mensosialisasikan dan melaksanakan pembinaan akses permodalan usaha di bidang perikanan;
- c. Memfasilitasi jaringan pemasaran hasil perikanan dan olahan lainnya;
- d. Melaksanakan identifikasi distribusi pemasaran ikan di Kabupaten Way Kanan;
- e. Melaksanakan pembinaan kelambagaan dan usaha terhadap pelaku usaha pemasaran produk perikanan;
- f. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi tentang sarana penunjang pemasaran ikan;
- g. Melaksanakan pameran dan promosi produk-produk unggulan perikanan daerah dari tingkat daerah hingga nasional, diberbagai event kegiatan dan kesempatan strategis lainnya;
- h. Melaksanakan pembinaan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB);
- i. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas/instansi terkait, lembaga, asosiasi dan lainnya untuk mengakses jaringan pemasaran bagi produk hasil perikanan Kabupaten Way Kanan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- c. Seksi Bina Mutu dan Diverifikasi Produk Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan dan kebijakan program teknis di bidang bina mutu dan diversifikasi produk perikanan.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Bina Mutu dan Diverifikasi Produk Perikanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan mutu dan diversifikasi produk perikanan;
- c. Merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan hasil, diversifikasi produk, dan mutu produk perikanan;
- d. Menyiapkan bahan, mensosialisasikan dan melaksanakan pembinaan permodalan usaha di bidang perikanan;
- e. Merencanakan pembangunan dan pengelolaan pasar ikan serta melaksanakan pemantauan standar teknis serta operasional pasar ikan;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap bahan baku, proses produksi, penyimpanan serta distribusi hasil olahan perikanan;
- g. Melaksanakan pemantauan mutu produk perikanan dari bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan manusia;
- h. Menginisiasi dan memfasilitasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) dan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Kabupaten Way Kanan;
- i. Memberi petunjuk kelembagaan, manajemen, analisa usaha tani, dan kemitraan dalam rangka ketahanan pangan;
- j. Mengumpulkan, menganalisis, memeriksa dan menyebarluaskan informasi perikanan dalam rangka ketahanan pangan;
- k. Merencanakan penerapan standar teknis distribusi pangan asal ikan serta memantau pemanfaatan bahan pangan asal ikan dan hasil rekayasa genetika;



- l. Menginventarisasi usaha dan produksi pengolahan hasil perikanan serta membuat profil usaha perikanan yang ada di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
- m. Melaksanakan sosialisasi peraturan kemitraan serta menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kemitraan usaha;
- n. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian untuk bahan evaluasi atasan dalam pengambilan keputusan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4. Bidang Perikanan Budidaya**

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang perikanan budidaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian kegiatan Bidang Perikanan Budidaya yang meliputi kawasan dan usaha budidaya, pembenihan dan produksi budidaya, dan pakan, kesehatan ikan dan lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kajian pengembangan teknologi budidaya perikanan terapan berdasarkan komoditas unggulan dan program unggulan/potensial yang ada;
- c. Penetapan peta wilayah kerja, peta potensi perikanan budidaya;
- d. Penyeliaan unit-unit pembenihan ikan (BBI/UPR/Dempond/Hatchery) dan sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan budidaya lainnya;
- e. Pelaksanaan pembinaan, kelembagaan kelompok, pendataan pembudidaya ikan, fasilitas kemitraan usaha, fasilitas permodalan dan memfasilitasi kartu pembudidaya ikan (Aqua Card);
- f. Pemberian rekomendasi usaha pembudidaya ikan (pembudidayaan ikan di air tawar dan air payau termasuk di perairan umum);
- g. Pelaksanaan koordinasi dan transfer inovasi teknologi perikanan budidaya melalui pelaksanaan kegiatan bimtek, demonstrasi, percontohan/kaji terap kepada pelaku pembudidaya;

- h. Pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pembinaan mutu pakan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya;
- i. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan penyusunan pedoman teknis pembudidayaan ikan;
- j. Pemberian tugas kepada bawahan untuk kelancaran tugas selesai dan tepat waktu;
- k. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar sesuai dengan rencana kerja bidang;
- l. Pelaksanaan evaluasi bawahan dengan cara mengisi Sasaran kinerja pegawai (SKP) untuk bahan pengembangan karir;
- m. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perikanan Budidaya untuk bahan evaluasi atasan dalam pengambilan keputusan; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Perikanan Budidaya, membawahi:

- a. Seksi Pembenihan dan Produksi Budidaya;
- b. Seksi Kawasan dan Bina Usaha Perikanan; dan
- c. Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

- a. Seksi Pembenihan dan Produksi Budidaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan program kebijakan teknis perbenihan dan produksi budidaya.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pembenihan dan Produksi Budidaya mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan indentifikasi, inventarisasi, perencanaan, pembinaan, dan pemantauan perbenihan dan produksi budidaya;
- b. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi perencanaan dan analisis kebutuhan benih ikan, serta estimasi produksi yang dihasilkan;

- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penggunaan benih dan pakan yang digunakan oleh pembudidaya;
  - d. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan perencanaan operasional Balai Benih Ikan (BBI) Lokal dan Dempond, serta perencanaan distribusi benih, calon induk dan induk yang dihasilkan oleh BBI;
  - e. Melaksanakan inventarisasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap Unit Pembenihan Rakyat, dan penangkar ikan hias berdasarkan standarisasi nasional (SNI), serta melaksanakan pengawasan terhadap mutu, peredaran dan metode yang diterapkan;
  - f. Melaksanakan inventarisasi kebutuhan sarana prasarana untuk menunjang pengembangan usaha perbenihan ikan dan usaha pembudidaya ikan;
  - g. Melaksanakan kegiatan untuk merangsang penumbuhan usaha skala kecil di bidang perikanan budidaya;
  - h. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan usaha pembudidaya ikan skala kecil;
  - i. Melaksanakan komunikasi, koordinasi dan melaksanakan transfer inovasi teknologi perikanan budidaya (melalui pelaksanaan kegiatan demonstrasi/percontohan/kaji terap) kepada petani;
  - j. Melaksanakan pemantauan dampak penerapan teknologi anjuran dalam bidang perikanan;
  - k. Memberikan bimbingan teknis tentang penanganan mutu ikan pada kegiatan budidaya hingga saat panen;
  - l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi untuk bahan evaluasi atasan dalam pengambilan keputusan; dan
  - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- b. Seksi Kawasan dan Bina Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan program kebijakan teknis di bidang budidaya perikanan.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Kawasan dan Bina Usaha Perikanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan merencanakan kegiatan

seksi kawasan dan usaha budidaya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- b. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan penerapan teknologi budidaya, serta memberikan petunjuk standar-standar teknik terapan;
  - c. Merencanakan kebutuhan, alat dan mesin perikanan, serta memantau produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin perikanan, memeriksa, mengkaji dan mendemonstrasikan alat dan mesin perikanan, menyebar prototipe alat dan mesin perikanan yang telah direkomendasikan;
  - d. Merencanakan estimasi dan perhitungan produksi dan produktivitas ikan terkait dengan luas potensi dan luas pemanfaatan lahan budidaya ikan;
  - e. Melaksanakan pembinaan penguatan kelembagaan Pokdakan;
  - f. Melaksanakan pembinaan akses permodalan bagi Pokdakan;
  - g. Melaksanakan pembinaan usaha kecil pebudidaya ikan dan fasilitasi penerbitan SIUP;
  - h. Memberikan pembinaan sumber daya perikanan budidaya melalui peningkatan pendidikan teknologi perikanan bagi pokdakan melalui pelatihan, bimtek, dan magang;
  - i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Kawasan dan Bina Usaha Perikanan untuk bahan evaluasi atasan dalam pengambilan keputusan; dan
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- c. Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan program kegiatan di bidang pakan, kesehatan ikan dan lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan inventarisasi, perencanaan dan pemantauan terhadap kebutuhan pakan dan jenisnya, obat-obatan ikan, peredaran dan penggunaannya;

- b. Melaksanakan pembinaan teknik pembuatan pakan, menyusun formulasi pakan ikan, dan melaksanakan inovasi terhadap pembuatan pakan ikan dengan pemanfaatan bahan baku lokal;
- c. Melaksanakan pembinaan mutu pakan yang digunakan petani pembudidaya ikan;
- d. Melaksanakan pengamatan, penyidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan, serta kawasan/lingkungan budidaya;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Pos Kesehatan Ikan serta sarana dan pelayanan kesehatan yang lain;
- f. Membuat Juklak/Juknis standar teknis dan prosedur pengawasan produk pangan Ikan ataupun produk hewan non pangan, higiene, sanitasi dan kesehatan Ikan;
- g. Merencanakan dan memfasilitasi pelayanan kesehatan ikan sesuai ketentuan dinas serta mendistribusikan kepada petugas sesuai ketentuan yang ada;
- h. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan evaluasi kebijakan kesehatan masyarakat veteriner;
- i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan untuk bahan evaluasi atasan dalam pengambilan keputusan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Daerah dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumberdaya Alam

Kabupaten Way Kanan terletak pada 4,12°-4,58°LS dan 104,17°-105,04°BT, memiliki luas total wilayah 3.921,63 km<sup>2</sup> atau sebesar 11,11 persen dari luas Provinsi Lampung. Secara administratif Kabupaten Way Kanan memiliki 15 Kecamatan yaitu Blambangan Umpu, Umpu Semenguk, Banjit, Bahuga, Baradatu, Kasui, Pakuan Ratu, Negara Batin, Way Tuba, Negeri Agung, Negeri Besar, Gunung Labuhan, Rebang Tangkas, Buay Bahuga dan Negeri Agung serta memiliki 221 Kampung dan 6 Kelurahan.

Batas-batas wilayah Kabupaten Way Kanan meliputi : sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat.

Jumlah penduduk Kabupaten Way Kanan pada tahun 2020 adalah sebanyak 473.575 orang, yang sebagian besar tinggal di kampung dengan mata pencaharian adalah bertani, beternak, bertani ikan dan nelayan air tawar. Potensi alam lainnya adalah 6 (enam) sungai yaitu :

**Tabel 2.1** Nama sungai dan daerah alir Kabupaten Way Kanan

Nama Sungai Name of Rivers	Panjang Lengths (Km)	Daerah Alir Cathement Area
(1)	(2)	(3)
Way Kanan	51	1.198
Way Pisang	50	386
Way Umpu	100	1.179
Way Besay	113	870
Way Giham	80	506
Way Tahmi	60	550

Sumber/Source: Badan Petanahan Nasional Kabupaten Way Kanan/National Land Agency of Way Kanan Regency

### 2.2.2. Sumberdaya Aparatur

Berdasarkan data Jumlah pegawai pada tahun 2021 secara keseluruhan yang menjalankan kegiatan operasional Dinas Perikanan berjumlah 21 orang dengan rincian sebagaimana tertera pada Tabel 2.2

Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan :

No	Golongan	Jumlah Pegawai
1	I	-
2	II	2
3	III	15
4	IV	4
	<b>Total</b>	<b>21</b>

Tabel 2.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Magister	4
2	Sarjana	14
3	Diploma	1
4	SLTA	2
	<b>Total</b>	<b>21</b>

Jumlah Penyuluh Perikanan PNS (Pegawai Pusat) ada 5 orang, Jumlah PPB (Penyuluh Perikanan Bantu) Tenaga Kontrak Pusat ada 1 Orang dan Jumlah tenaga honorer dan teknisi BBI adalah 15 orang (6 orang tersebar dikantor dan 9 orang di UPT BBI).

Dalam kondisi saat ini, jumlah sumberdaya manusia yang ada di Dinas Perikanan belum mencapai kondisi ideal, sehingga masih diperlukan penambahan SDM dari PNS maupun penyuluhan yang berdasarkan pendidikan berlatar perikanan. Dikarenakan hingga saat ini Dinas Perikanan hanya memiliki 4 orang berlatar pendidikan perikanan dari total 21 orang pada tingkat pendidikan.

### 2.2.3 Sarana Pendukung

Sarana pendukung yang dimiliki Dinas Perikanan adalah berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, serta aset dokumen kearsipan. Secara umum, aset yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan dapat diuraikan berikut ini :

1. Kantor Dinas Perikanan berjumlah 1 ( satu ) unit berada di Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.
2. Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah ( UPTD ) Balai Benih Ikan sebanyak 1 (satu) unit berada di Kampung Sumber Sari, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan.
3. Sarana operasional berupa kendaraan roda empat dan roda dua.
4. Peralatan kantor (1 Komputer, 7 Printer, 1 LCD proyektor, 1 wireless, 8 Laptop, meja-kursi kantor, dll)

Tabel 2.4 Aset yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangann
1	Tanah	2	Baik	Sarprasoperasionaldinasdan1 UPTD
2	Peralatan dan Mesin	175	Baik	Sarprasoperasionaldinasdan1 UPTD
3	Gedungdan Bangunan	28	Baik	Sarprasoperasionaldinasdan1 UPTD
4	Jalan,Jaringan dan Irigasi	14	Baik	Sarprasoperasionaldinasdan1 UPTD
5	Aset tetaplainnya	0		
	Aset tetapdalam renovasi	0		
6	Konstruksidalam Pengerjaan	-		

Sarana kerja penunjang lain yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan adalah berupa sarana informasi portal berupa website dengan alamat akses <http://dinasperikanan.waykanan.go.id>, Email : [perikananwaykanan@yahoo.com](mailto:perikananwaykanan@yahoo.com), Instagram : @dinasperikanan23; Sarana informasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Way Kanan.



### **2.3 KINERJA DAN PELAYANAN OPD**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dapat lebih terarah baik dari segi administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang di lakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis serta penyusunan program dan kegiatan teknis dan strategis dalam pembangunan bidang perikanan
2. Memberikan pelayanan umum, baik berupa pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun kepada instansi vertikal atau horizontal.
3. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang perikanan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, Provinsi, atau APBN.

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan (T-C.23)

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
					Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Produksi Perikanan Tangkap				199.79	200.79	201.80	202.81	203.82	185.75	165.40	195.73	197.73	198.71	92.97	82.37	96.99	97.50	97.49
2	Produksi Perikanan Budidaya				1,371.55	1,441.65	1,518.10	1,601.75	1,693.53	1398.23	1442.8	1533.28	1,619.43	1,710.95	101.95	100.08	101.00	101.10	101.03
				Produksi Benih Ikan (ekor)	4,793,814	8,265,754	12,365,337	17,566,471	24,468,646	4,577,155	6,821,490	15,850,931	17,763,042	24,575,042	95.48	82.53	128.19	101.12	100.43
3	Volume Produk Perikanan yang dipasarkan				1,414.21	1,478.20	1,547.90	1,624.10	1,707.61	1,425.58	1,447.38	1,554.31	1,635.44	1,718.69	100.80	97.92	100.41	100.70	100.65
				Peningkatan Konsumsi Ikan Kabupaten Way Kanan (Kg/Kap/Th)	26.79	27.59	28.42	29.27	30.15	26.01	33.19	33.19	33.45	33.45 **	97.09	120.30	116.78	114.28	114.28**

Berdasarkan Tabel diatas, sebagian besar indikator kinerja mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian, untuk indikator kinerja utama, yaitu produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan volume produk perikanan telah memenuhi target. Kondisi ini menjadi catatan penting dalam perumusan program dan kegiatan pada Renstra berikutnya. Pengembangan perikanan di Kabupaten Way Kanan diutamakan dalam rangka pemaksimalan produksi perikanan budidaya dikarenakan untuk meningkatkan potensi perikanan tangkap di perairan umum dinilai kurang maksimal dikarenakan terdapat beberapa faktor yang dapat menurunkan produksi tangkap di perairan umum seperti limbah dari pertanian, limbah pabrik olahan dan limbah pertambangan emas yang ada di sekitar bantaran sungai di Kabupaten Way Kanan. Sehingga upaya yang dapat dilakukan hanya bersifat mempertahankan ketersediaan sumberdaya ikan yang ada melalui pengembangan pengawasan yang berbasis masyarakat. Sedangkan menurunnya produksi perikanan budidaya terutama disebabkan intensifikasi usaha budidaya dengan peningkatan penguasaan teknologi perikanan pada pembudidaya ikan, Pemanfaatan Potensi Lahan Budidaya untuk kegiatan usaha produksi perikanan masih belum maksimal.

Untuk melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kinerja dan pelayanan OPD sebagaimana yang tercantum dalam renstra, maka dilakukan evaluasi secara periodik terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut:

#### **1. PDRB Sektor Pertanian dan subsektor Perikanan**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut BPS didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Sektor perikanan berkontribusi dalam kelompok Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Untuk menggambarkan

perkembangan PDRB dari tahun ketahun digunakan data PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha, dengan data 2016–2020 sebagai berikut :

**Gambar 2.** Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Way Kanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016 – 2020

Lapangan Usaha/Industry	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	37,19	36,44	36,05	35,04	36,13
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	4,59	4,61	4,57	4,57	4,81
C Industri Pengolahan/Manufacturing	22,44	22,77	22,89	23,24	21,43
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
F Konstruksi/Construction	7,72	8,12	8,36	8,48	8,22
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	9,35	9,31	9,57	9,86	9,96
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	2,61	2,69	2,67	2,72	2,65
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	0,88	0,90	0,92	0,95	0,91
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	3,86	3,92	3,86	3,92	4,20
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	1,04	1,01	0,99	0,97	1,01
L Real Estat/Real Estate Activities	2,08	2,15	2,15	2,16	2,17
M,N Jasa Perusahaan/Business Activities	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	3,52	3,44	3,37	3,32	3,51
P Jasa Pendidikan/Education	3,02	2,96	2,92	3,04	3,19
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	0,98	0,94	0,94	0,96	1,08
R,S,T,U Jasa lainnya/Other Services Activities	0,54	0,55	0,55	0,56	0,53
<b>Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Angka sementara/Preliminary Figures  
 \*\* Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Way Kanan Menurut Lapangan Usaha 2016-2020 (Way Kanan dalam Angka, 2020).

Ditinjau menurut kontribusi setiap lapangan usaha terhadap PDRB Way Kanan, perekonomian Kabupaten Way Kanan masih sangat bergantung pada sektor primer. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan lebih dari sepertiga penciptaan nilai tambah dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) Peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam menyumbang PDRB Way kanan di tahun 2020 adalah sebesar 36,13 persen. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih bernilai positif walaupun adanya Pandemi Covid-19 di tahun 2020.

Lapangan usaha yang menyumbang PDRB terbesar kedua adalah Industri Pengolahan yang mencapai 21,43 persen, mengalami penurunan dari 23,23 persen pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan lapangan usaha Industri Pengolahan merupakan lapangan usaha yang paling terdampak Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020. Sementara peranan lapangan usaha lainnya hanya memberikan kontribusi yang cukup kecil yaitu dibawah 10 persen.

**Gambar 3.** Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Way Kanan Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020

Lapangan Usaha/Industry		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	3,91	2,19	2,39	2,01	0,74
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	7,23	8,18	5,36	6,14	3,41
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	4,86	6,10	6,84	7,58	- 8,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	5,51	5,62	6,37	7,38	9,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	5,93	7,01	3,87	7,00	4,33
F	Konstruksi/Construction	6,38	10,62	9,52	5,61	- 2,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	6,34	5,02	7,65	6,15	- 0,89
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	9,45	7,08	6,36	8,91	- 4,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	6,01	8,37	8,45	8,33	- 3,98
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	8,54	9,36	5,69	7,96	8,02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	3,04	3,59	1,57	3,33	4,87
L	Real Estat/Real Estate Activities	6,18	7,83	4,82	6,73	- 1,48
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	4,83	5,62	2,49	3,97	- 1,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	4,10	4,32	4,47	4,78	4,77
P	Jasa Pendidikan/Education	4,88	5,40	5,32	8,75	4,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	3,49	4,71	6,72	7,81	11,16
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	4,08	8,64	5,27	8,28	- 4,47
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		5,12	5,11	5,18	5,17	- 1,16

\* Angka sementara/Preliminary Figures

\*\* Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Way Kanan Menurut Lapangan Usaha 2016-2020 (Way Kanan dalam Angka, 2020).

Pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 sehingga 2021 secara nyata mempengaruhi kondisi perekonomian di seluruh Indonesia tak terkecuali Kabupaten Way Kanan. Segala bentuk kebijakan pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19 mulai dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), bekerja dari rumah, belajar dari rumah, pelarangan mudik, dan pembatasan transportasi menekan kinerja beberapa lapangan usaha. Sebanyak delapan kategori lapangan usaha mengalami kontraksi. Industri Pengolahan merupakan lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam yaitu 8,37 persen. Lapangan usaha yang juga mengalami kontraksi cukup dalam yaitu Jasa lainnya yang terkontraksi sebesar 4,47 persen serta lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang terkontraksi sebesar 4,41 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha mampu mencatatkan pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 11,16 persen, diikuti Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 9,08 persen, dan juga Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 8,02 persen.

**Gambar 4.** Peranan dan Pertumbuhan Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (persen), 2016-2020



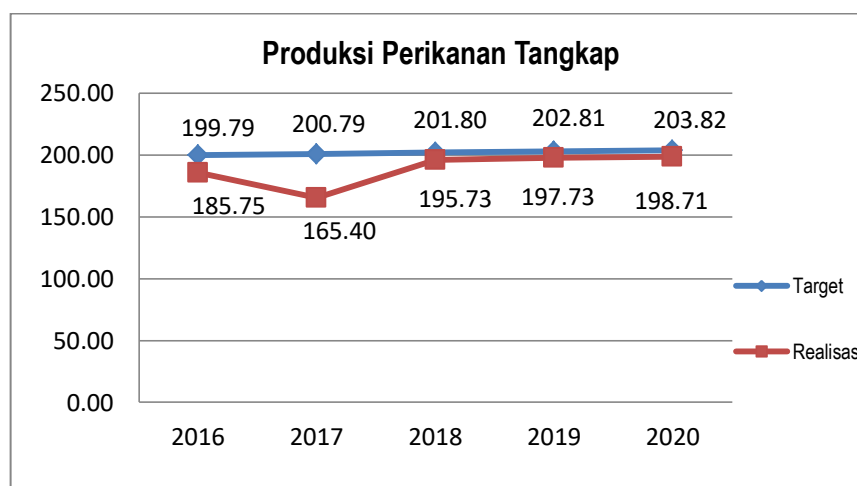
Sumber: *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Way Kanan Menurut Lapangan Usaha 2016-2020 (Way Kanan dalam Angka, 2020).*

Selama periode 2016-2020 pertumbuhan yang dicapai kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mampu mencatatkan pertumbuhan diatas 2 persen. Akibat adanya Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 mengakibatkan pertumbuhan kategori ini hanya mampu tumbuh sebesar 0,74 persen. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan terendah selama satu dasawarsa terakhir.

## 2. Produksi Perikanan

Tingkat kontribusi dan pertumbuhan Sub sektor Perikanan ditunjukkan dengan perkembangan produksi perikanan di Kabupaten Way Kanan. Sumber produksi perikanan Way Kanan berasal dari Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya. Untuk perikanan tangkap selama lima tahun terakhir, 2016-2020 tingkat produksinya mengalami kenaikan. Data produksi perikanan tangkap diperoleh dari penjumlahan data-data produksi kecamatan yang memiliki kawasan perairan dan nelayan serta hasil tangkapan dari perairan umum seperti sungai. Perkembangan produksi perikanan tangkap sebagaimana Gambar 5 dibawah ini :

**Gambar 5.** Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 (ton)

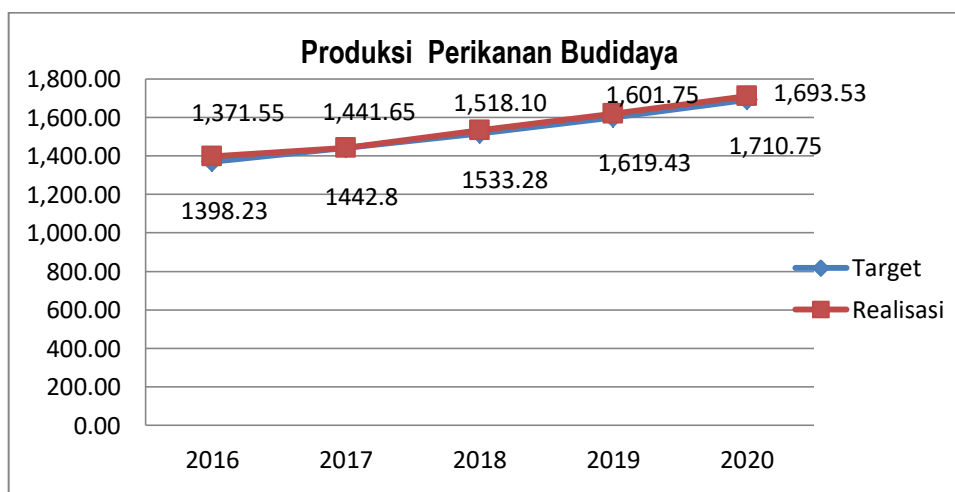


*Sumber:* Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penangkapan di Kabupaten Way Kanan Tahun, 2020 (*Way Kanan dalam Angka, 2020*).

Berdasarkan grafik diatas, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Way Kanan cukup berfluktuasi dengan kecenderungan naik sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2016 produksi perikanan tangkap mencapai 185.75 ton namun pada tahun 2017 justru menurun hingga 165,40 ton tetapi mengalami kenaikan dari tahun 2018 sehingga 2020. Ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi penurunan tersebut, antara lain: faktor cuaca dan musim penangkapan yang mempengaruhi hasil tangkapan dan hari penangkapan nelayan, serta kebijakan kewenangan pengawasan dari pusat di langsung di tangani provinsi sehingga pemerintah daerah tidak dapat melakukan wewenang tanpa berkoordinasi dengan provinsi, termasuk perubahan system pengelolaan statistik perikanan (kebijakan/aplikasi satu data).

Selain hasil produksi perikanan tangkap, produksi perikanan juga berasal dari hasil produksi perikanan budidaya. Perkembangan produksinya juga mengalami fluktuasi sebagaimana Gambar 6.

**Gambar 6.** Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 (ton)



Sumber: LDA BPS Lampung, 2016-2020; \*Statistik Satu Data KKP

Berdasarkan grafik diatas, produksi perikanan budidaya di Kabupaten Way Kanan cenderung terus naik sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2016 produksi perikanan budidaya mencapai 1.398,23 ton. Kemudian pada tahun berikutnya terus meningkat hingga pada tahun 2020 mencapai 1.710,95 ton. Jika dibandingkan dengan



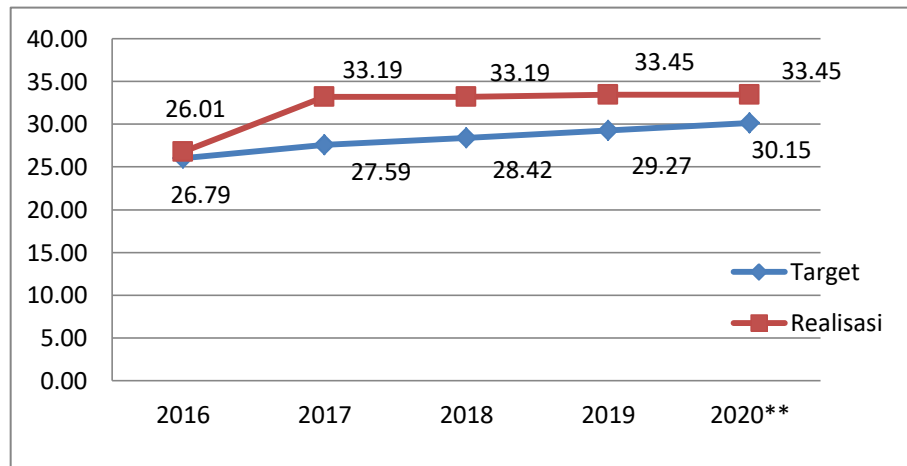
target yang ditetapkan capaian kinerja produksi perikanan budidaya sudah mencapai 95,34%. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk program dan kegiatan dalam mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya pada renstra 2021–2026 antara lain, Pengembangan pemanfaatan lahan tidak produktif bagi usaha budidaya ikan, Mengadakan penyuluhan secara berkala tentang manajemen budidaya ikan bagi usaha budidaya ikan, secara bertahap dan berkelanjutan melakukan pembangunan sarana prasarana budidaya ikan, pengembangan sentra budidaya ikan komoditas unggulan sesuai dengan kondisi daerah, peningkatan teknologi budidaya dengan pemberian informasi secara terus menerus dan berkelanjutan, pengembangan sarana prasarana UPR dan BBI.

Selain upaya di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga membuat surat edaran terkait pelarangan kenaikan harga pakan ikan selama pandemi Covid-19, sehingga harga pakan tidak makin naik dan dapat menekan harga produksi pengembangan pokdakan/kelompok pembuat pakan ikan mandiri diarahkan memanfaatkan bahan baku lokal pengganti pakan ikan pabrikan yang mahal.

### **3. Konsumsi Ikan per-Kapita**

Ikan merupakan salah satu sumber makanan hewani yang sangat baik untuk manusia karena berprotein tinggi. Tingkat konsumsi ikan masyarakat terus meningkat sejak 2016 hingga 2020 sebagaimana Gambar 7 berikut:

**Gambar 7.** Konsumsi Ikan per Kapita Kabupaten Way Kanan  
Tahun 2016-2020 (kg/kap/th)



(\*\* data sementara)

Sumber: Bidang Tangkap & Daya Saing Produk Perikanan Dinas Perikanan 2016–2020

Meskipun secara tren meningkat sejak tahun 2016, namun tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Way Kanan masih jauh dari target dan capaian konsumsi ikan nasional. Pada tahun 2019 angka konsumsi ikan Provinsi Lampung mencapai 33,45kg/kap/thn sedangkan capaian nasional sudah sebesar 54,49kg/kap/thn. Dari data tersebut, Dinas Perikanan perlu meningkatkan kampanye gerakan makan ikan (Gemarikan) dikecamatan/kampung di Kabupaten Way Kanan, meningkatkan mutu dan nilai tambah produk olahan termasuk meningkatkan ketersediaan produksi ikan dengan harga yang kompetitif. Peningkatan angka konsumsi ikan menjadi penting dan strategis saat ini karena selain meningkatkan gizi dan sumber protein masyarakat sekaligus bagian dari penanganan stunting yang saat ini cukup mengawatirkan, termasuk di Kabupaten Way Kanan.

Gambaran ketersediaan ikan produksi lokal dan kebutuhan ikan di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2020 dapat dilihat pada table 2.6 di bawah ini.

Tabel 2.6. Gambaran Ketersediaan Ikan dan Kebutuhan Ikan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

No	Uraian	Volume ( Ton )	Keterangan
1	Total Ketersediaan Ikan Produksi Budidaya Produksi Tangkap	<b>1.909,66</b> 1.710,95 198,71	Ketersediaan = Prod.Budidaya + Prod.Tangkap
2	Kebutuhan Ikan Tingkat Konsumsi (Kg/kap/tahun) Jumlah Penduduk (Jiwa) *	<b>15.056,15</b> 33.45 450.109	Kebutuhan = $\frac{\text{Tingkat Konsumsi Ikan} \times \text{Jumlah Penduduk}}{1000}$

Sumber : Data Way Kanan dalam Angka, 2020

Berdasarkan Tabel 2.6 diatas ketersediaan ikan produksi lokal masih memenuhi kebutuhan di Kabupaten Way Kanan sebesar 12,68%, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masih didatangkan dari daerah lain.

#### 4. Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah dan Realisasi Pendanaan.

Secara garis besar terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang dievaluasi, dengan 2 indikator terkait program kegiatan perikanan. Pencapaian kinerja juga dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran dalam mendukung program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Dalam kondisi yang normal, program dan kegiatan yang sudah direncanakan mendapat alokasi pagu yang sesuai sehingga indikator kinerja yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Kondisi yang lebih ideal apabila indikator kinerja tercapai meskipun alokasi pendanaan lebih kecil dari yang direncanakan. Realisasi pendanaan tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan pemerintah daerah secara umum.

Berikut ini adalah Tabel Rencana Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan dalam Renstra 2016–2020 yang nilai realisasinya diambil setelah APBD Perubahan setiap tahunnya.

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan (T-C.24)

Uraian /Program & Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada					Rasio antara Realisasi dan					Rata-rata	
	ke-					Tahun ke-					Anggaran Tahun ke-					Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Belanja Tidak Langsung (Gaji)	-	1,986,753,087	1,962,893,804	2,165,162,058	1,929,350,500	-	1,806,380,877	1,811,961,046	1,970,916,936	1,822,380,914	-	90.92	92.31	91.03	94.46		
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	-	107,820,000	-	61,999,810	17,500,000	-	107,820,000	-	61,951,560	17,500,000	-	100.00	-	99.92	100.00		
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	-	914,625,000	816,063,000	549,992,620	127,044,450	-	906,670,000	814,692,000	466,888,970	127,031,500	-	99.13	99.83	84.89	99.99		
Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	-	450,000,000	409,190,000	302,999,506	18,286,800	-	449,735,000	398,300,000	272,880,488	18,286,800	-	99.94	97.34	90.06	100.00		
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar	-	-	1,112,173,000	1,098,568,488	-	-	-	1,049,325,300	1,088,123,000	-	-	-	94.35	99.05	-		
Program Administrasi Perkantoran	-	341,264,000	367,845,000	401,301,405	199,752,600	-	335,164,000	364,627,922	392,881,200	180,732,805	-	98.21	99.13	97.90	90.48		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	118,750,000	117,100,000	65,900,000	16,684,400	-	118,750,000	116,800,000	65,900,000	16,684,400	-	100.00	99.74	100.00	100.00		
Program Peningkatan Displin Aparatur	-	17,000,000	10,000,000	8,750,000	-	-	15,450,000	10,000,000	8,750,000	-	-	90.88	100.00	100.00	-		
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-	-	18,443,100	25,000,000	-	-	-	18,443,100	25,000,000	-	-	-	100.00	100.00	-		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	16,450,000	18,950,000	19,999,146	48,368,100	-	16,450,000	18,950,000	19,998,394	48,363,700	-	100.00	100.00	100.00	99.99		
<b>TOTAL</b>	-	<b>3,952,662,087</b>	<b>4,832,657,904</b>	<b>4,699,673,033</b>	<b>2,356,986,850</b>	-	<b>3,756,419,877</b>	<b>4,603,099,368</b>	<b>4,373,290,548</b>	<b>2,230,980,119</b>	-	<b>95.04</b>	<b>95.25</b>	<b>93.06</b>	<b>94.65</b>		

Berdasarkan Tabel diatas, Dinas Perikanan Mulai Pendanaan pada tahun 2017, dikarenakan Dinas Perikanan Memecah Dinas dari Dinas Hortikultura dan Peternakan. Realisasi pendanaan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) satker nilainya jauh dari yang direncanakan dalam Renstra maupun renja, bahkan pada tahun 2018 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar mendapat alokasi Dana Transfer Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor kelautan dan perikanan untuk Rehab UPT Balai Benih Ikan dan tahun 2019 DAK Penyediaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan).

Namun di tahun 2020 RPJMD, realisasi pendanaan menurun drastis, terutama setelah ditetapkannya APBD Perubahan tahun berjalan. Pemerintah Daerah terpaksa menerapkan kebijakan efisiensi untuk dampak *Coronavirus disease* (Covid-19) yang mewabah di Indonesia. Hal ini berimbas juga pada alokasi APBD di Dinas Perikanan dimana setelah penetapan APBD Refocusing TA.2020 anggaran satker mengalami pemangkasan anggaran sebesar -73% dari anggaran awal sebesar Rp.1.020.000.000,- menjadi hanya sebesar Rp.427.636.350,-.

Dinamika pendanaan dan kondisi keuangan pemerintah daerah harus menjadi perhatian bersama dalam pengusulan pagu indikatif program dan kegiatan. Masing-masing bidang dan UPTD agar cermat menghitung kebutuhan belanja kegiatan, menetapkan prioritas dan focus pada pencapaian indikator kinerja utama. Efisiensi dan efektifitas serta strategi kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan harus diperhatikan agar pencapaian indikator kinerja tidak harus membutuhkan atau tergantung pada pendanaan yang besar. Selain itu mencari sumber-sumber pendanaan diluar APBD.

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Perikanan berdasarkan tugas dan fungsi utamanya kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Perikanan untuk

mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan.

1. Tantangan

Tantangan yang muncul dalam pengembangan pelayanan perikanan di Kabupaten Way Kanan diantaranya sebagai berikut :

- a) Penataan Kawasan Perikanan belum tertata dengan baik,
- b) Penurunan daya dukung dan kualitas lingkungan dan ancaman serangan penyakit,
- c) Keterbatasan SDM, sarana dan prasarana serta anggaran dalam mendukung upaya pengembangan sektor perikanan

2. Peluang

Beberapa peluang yang dapat diambil dalam upaya pengembangan sektor Perikanan antara lain :

- a) Adanya landasan hukum yang kuat terkait pembangunan perikanan di Kabupaten Way Kanan diantaranya :
  - Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
  - Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
  - Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan;
  - Peraturan Bupati No.37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan.
- b) Kabupaten Way Kanan memiliki potensi perikanan yang cukup besar dan belum termanfaatkan secara optimal,
- c) Meningkatnya dukungan pusat ( kementerian KKP ) dan DPR RI serta Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam pengembangan perikanan,
- d) Tingginya permintaan pasar akan produk perikanan,

- e) Berkembangnya teknologi perikanan dalam upaya peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah produk perikanan baik di pemerintah, perguruan tinggi dan swasta.

### 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang tugas dan fungsinya merupakan pelaksana tugas di bidang perikanan serta pengambil kebijakan dalam pembangunan bidang perikanan. Kebijakan dan strategi yang di ambil di sektor perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan dan mutu serta kualitas hasil perikanan baik dalam bentuk ikan segar maupun ikan olahan, oleh karena itu guna mengidentifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan, maka dapat dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seperti dirumuskan pada table 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas  
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
-1	-2	-3	-4
1	Belum Optimalnya Peningkatan Produksi Perikanan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Belum Optimalnya Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Belum Optimalnya Kelembagaan Pelaku Usaha Budidaya Perikanan Belum optimalnya Ketersediaan sarana prasarana perikanan budidaya Belum Optimalnya Ketersediaan Benih Ikan Unggul Belum Optimalnya SDM dalam Penguasaan Teknologi Perikanan



		Belum Optimalnya Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Penurunan Daya Dukung dan Kualitas Perairan Umum
		Belum Optimalnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk Perikanan	Rendahnya Tingkat Konsumsi Ikan di Kabupaten Way Kanan
			Rendahnya Kelembagaan Pelaku Usaha Pengolahan
			Rendahnya Mutu Produk Perikanan

### 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati–Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2021-2026) adalah **“Way Kanan Unggul dan Sejahtera.”** Dengan 4 misi pembangunannya yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Berkelanjutan
3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah
4. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur

Terkait dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan mendukung dalam pencapaian misi 1( satu ) yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik** dan misi 4 (empat) yaitu **Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur.**

Perikanan termasuk salah satu poin penting yang tidak terlepas dari pertanian. Peningkatan komoditas perikanan diharapkan mampu untuk menaikkan daya saing daerah dan ikut berperan aktif dalam menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Way Kanan. Melalui upaya peningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah ekonomi khususnya komoditas perikanan, peningkatan mutu produk perikanan,

fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan sarana dan prasarana serta Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan), dan menata kawasan yang sudah ada untuk keberlanjutan usaha.

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : Way Kanan Unggul dan Sejahtera				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
	KDH dan Wakil KDH terpilih		Penghambat	Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
1	MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			
	Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah			
	Sasaran: Meningkatkan kualitas SAKIP SKPD			
	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Menurunnya nilai SAKIP SKPD	Kurangnya SDM pada Perangkat Daerah yang memahami penyusunan SAKIP yang baik. Masih rendahnya kualitas dokumen pendukung (RKT, Renja, Laporan Tahunan)	Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikuti Bimtek SAKIP
	Tujuan : Meningkatnya Kinerja Organisasi			
	Sasaran: Meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negera			
	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kurangnya SDM pada perangkat daerah	belum optimal dimana terdapat aparatur yang kurang menyadari tugas dan fungsinya sehingga seringkali timbul ketimpangan- ketimpangan dalam menjalankan tugasnya sehingga masih terdapat Aparatur Sipil Negara yang belum melaksanakan tugasnya dengan baik	Meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negera dengan mengikuti Bimtek untuk mendukung kompetensi ASN

4	MISI IV : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur			
	<p>Tujuan : Meningkatkan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan</p> <p>Sasaran : Meningkatkan Produksi Ikan Lele</p> <p>Meningkatkan Produksi Ikan Nila</p> <p>Meningkatkan Produksi Ikan Gurame</p> <p>Meningkatkan Produksi Ikan Mas</p> <p>Meningkatkan Produksi Ikan Patin</p> <p>Meningkatkan Produksi Ikan Baung</p> <p>Meningkatkan Produksi Ikan Lainnya</p> <p>Meningkatkan Produksi Benih Ikan Lele</p> <p>Meningkatkan Produksi Benih Ikan Nila</p> <p>Meningkatkan Produksi Benih Ikan Gurame</p> <p>Meningkatkan Produksi Benih Ikan Mas</p> <p>Meningkatkan Produksi Benih Ikan Lainnya</p>			
	<p>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</p> <p>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</p>	Belum optimalnya peningkatan produksi perikanan	<p>1. Masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha perikanan</p> <p>2. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya</p> <p>3. Belum optimalnya SDM dalam penguasaan teknologi perikanan</p>	<p>1. Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan dengan Pembinaan dan sosialisasi</p> <p>2. Adanya penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung upaya peningkatan produksi budidaya seperti bibit ikan unggul, adanya sosialisasi dan pendampingan pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya,</p> <p>3. Melaksanakan pendampingan, pembinaan dan transfer teknologi dalam rangka peningkatan Kualitas SDM perikanan</p>

Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap		Penurunan daya dukung dan kualitas perairan umum	Adanya kegiatan pengawasan berbasis masyarakat dan pembinaan kepada nelayan untuk menggunakan alat tangkap nelayan yang ramah lingkungan
Meningkatkan Produksi Ikan Olahan		Pertumbuhan kegiatan pengolahan hasil perikanan belum maksimal	Adanya pendampingan, pembinaan dan transfer teknologi dalam rangka peningkatan produk olahan yang dihasilkan
Meningkatkan Produksi Ikan yang dipasarkan		Masih rendahnya informasi pemasaran produk perikanan	adanya kegiatan peningkatan informasi pasar produk perikanan, dan penguatan kelembagaan pelaku usaha pengolahan ikan
		Rendahnya tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Way Kanan	adanya gerakan memasyarakatkan gemar makan ikan (GEMARIKAN)

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung**

#### **3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Kelautan Dan Perikanan**

Telaah terhadap Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) Tahun 2020-2024, mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 (tiga) pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. Kedaulatan (*Sovereignty*); yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (*Sustainability*); yakni Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab dan berkeadilan untuk generasi sekarang dan akan datang.

3. Kesejahteraan (*Prosperity*); yakni Meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat kelautan dan perikanan.

Misi tersebut dalam rangka mewujudkan Visi Presiden 2020 – 2024 yaitu :

***Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***

Secara khusus, arahan Presiden kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru yaitu:

- 1) Memperbaiki komunikasi dengan nelayan dan
- 2) Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat lagi.

Untuk mewujudkan misi dan arahan Presiden tersebut, terdapat 5 (lima) arah kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan yang akan ditempuh oleh KKP, yaitu:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan
2. Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dan karantinaikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

### 3.3.2 Telaah Renstra Dinas Perikanan Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sebagai salah satu organisasi pemerintah di Lampung, dalam rangka melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai visi, yaitu :

#### **“Rakyat Lampung Berjaya”**

Untuk mewujudkan visi yang telah dijelaskan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mempunyai Misi :

5. Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan
6. Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama

Berdasarkan rumusan misi diatas, penjabaran ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung pada tahun 2019-2024 akan dirinci sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi perikanan
2. Meningkatnya daya saing produk hasil perikanan
3. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai PERDA RZWP3K

Berdasarkan analisis SWOT dari isu-isu strategis maka terdapat beberapa strategi yang menjadi arah kebijakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan kurun waktu 2019-2024 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan

Arah Kebijakan :

1. Pengelolaan laut dan pesisir berkelanjutan
2. Pelaksanaan pengawasan terpadu dan terintegrasi

2. Meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha perikanan

Arah Kebijakan :

1. Pengembangan sistem budidaya perikanan berkelanjutan
  2. Pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan dan berkeadilan
3. Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan nilai tambah, mutu, keamanan pangan dan pemasaran produk perikanan
2. Penguatan kapasitas kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana, data teknologi dan informasi kelautan dan perikanan.

Selain strategi dan arah kebijakan tersebut diatas, program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Renstra 2019-2024 juga memperhatikan pengarusutamaan dari:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs); Implementasi SDGs (Goal 14), meningkatkan luasan kawasan konservasi perairan yang dikelola.
2. Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (PPRB); Penyelarasan Renja tahunan dengan Pergub No: 164 thn 2018 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Perairan Pesisir Timur Lampung Provinsi Lampung
3. Stunting; Prioritas daerah rawan stunting untuk kegiatan Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah dan Ibu Hamil, Meningkatkan angka konsumsi ikan masyarakat.
4. Penanggulangan kemiskinan; Penyelarasan lokasi dan sasaran kegiatan/ bantuan pada rumah tangga miskin yang berpotensi.
5. Gender; Meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan KP.

Tabel 3.3. Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
-1	-2	-3	-4	-5
	Peningkatan Produksi Perikanan		Meningkatnya produksi dan pendapatan nelayan dan pembudidaya	Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing
1	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Lele	5.00		
2	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Nila	5.00		
3	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Gurame	5.56		
4	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Mas	1.01		
5	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Patin	3.94		
6	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Baung	2.48		
7	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Lainnya	0.17		
8	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Lele	10.00		
9	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Nila	10.00		
10	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Gurame	1.50		
11	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Mas	5.00		
12	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Lainnya	1.00		



13	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0.52	Meningkatnya produksi dan pendapatan nelayan dan pembudidaya	Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing
14	PersentasePeningkatkan Produksi Ikan olahan	5.17	Meningkatnya daya saing produk hasil perikanan	
15	Persentase Peningkatan Volume Produk Hasil Perikanan yang dipasarkan	5.00		
16	Nilai SAKIP Dinas Perikanan	46.09	Meningkatnya penilaian laporan akuntabilitas kinerja dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan	Tatakelola Pemerintahan yang baik
17	Nilai Komponen Kinerja Organisasi	52.31	-	-

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
1	Meningkatnya produksi perikanan	Masih belum optimalnya produksi sektor perikanan	Faktor cuaca dan alam yang tidak bisa diprediksi paling mendominasi dalam sektor kelautan dan perikanan	Potensi kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang begitu melimpah
		Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Kurangnya Sarana dan Prasarana Perbenihan	Pemberian bantuan sarana prasarana pembenihan
		Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan para pelaku usaha budidaya	Penerapan CBIB dan CPIB yang belum optimal	Adanya pembinaan penerapan CBIB dan CPIB pada pembudidaya kecil
		Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan Lemah	Kurangnya pemahaman pelaku usaha budidaya ikan untuk mempermudah dalam permodalan	Adanya pembinaan pada pelaku usaha
		Penurunan Daya Dukung dan Kualitas Perairan Umum	Penangkapan ikan masih menggunakan peralatan yang sederhana	Pemberian alat penangkapan ikan
2	Meningkatnya daya saing produk hasil perikanan	Tingkat konsumsi makan ikan Kabupaten Way Kanan terbilang rendah dilihat dari skala nasional	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya manfaat mengkonsumsi ikan	Adanya promosi tentang gerakan memasyarakatkan gemar makan ikan, Lomba cipta menu serba ikan
		Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan para pelaku usaha pengolahan ikan dalam diversifikasi hasil olahan produk perikanan	Masih Kurangnya bimtek dan pelatihan mengenai cara penanganan dan pengolahan hasil perikanan yang baik dan benar	Adanya Pembinaan dan bimtek mengenai cara penanganan dan pengolahan hasil perikanan yang baik dan benar

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Way Kanan yaitu “ Terwujudnya Kabupaten Way Kanan berbasis pertanian yang unggul dan berdaya saing dengan mengoptimalkan aksesibilitas dan memperhatikan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan.”

Kebijakan penataan ruang dan wilayah Kabupaten meliputi :

- a. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya seluruh wilayah kabupaten;
- b. Peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan dan nilai jual pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- c. Perwujudan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup;
- d. Pembukaan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah;
- e. Pengurangan kesenjangan pembangunan ekonomi antar kawasan; dan
- f. Pengentasan kemiskinan di kawasan tertinggal.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Way Kanan meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya meliputi kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan pemukiman, kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Way Kanan dibagi menjadi dua, yaitu: kawasan peruntukan perikanan tangkap dan kawasan peruntukan perikanan budidaya. Kawasan peruntukan perikanan tangkap meliputi seluruh badan sungai di wilayah Kabupaten Way Kanan. Sedangkan kawasan peruntukan perikanan budidaya

berupa budidaya pembibitan dan budidaya pembesaran dengan luas rencana peruntukan kawasan perikanan adalah 6.663 Ha.

Kawasan perikanan berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Kawasan perikanan tersebut dapat dibangun bangunan hunian, sarana wilayah lainnya secara terbatas dan sesuai kebutuhan, kawasan pertanian masih dapat dialihfungsikan sesuai ketentuan yang berlaku, diperkenankan dilakukan kegiatan wisata, penelitian, pendidikan secara terbatas, tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat polutif, khususnya polusi air

KLHS RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 disusun bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang termuat didalam RPJMD Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2026 telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang merupakan skema pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari generasi ke generasi. Dalam hal ini, Dinas Perikanan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals (SDGs)* pada tujuan :

1. Menurunkan tingkat kemiskinan dan
8. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan dan lingkup pelayanannya

<b>Kekuatan ( STRENGTH )</b>	<b>Kelemahan ( WEAKNES )</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Adanya regulasi yang mendukung pengembangan usaha di bidang perikanan seperti UU Perikanan, Perda Perangkat Daerah</li> <li>➤ Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dalam pengembangan bidang perikanan</li> <li>➤ Adanya SDM baik aparatur maupun pelaku usaha di bidang perikanan</li> <li>➤ Terdapat UPT BBI dan Unit Pembenihan untuk mendukung pengembangan usaha bidang perikanan</li> <li>➤ Memiliki Potensi Perairan yang cukup, seperti sungai, embung dan irigasi teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Keterbatasan Sarana Prasarana dan Anggaran</li> <li>➤ Keterbatasan SDM Perikanan</li> <li>➤ Rendahnya kualitas SDM Aparatur maupun pelaku usaha</li> <li>➤ Rendahnya ketersediaan benih ikan unggul</li> <li>➤ Lemahnya Penerapan CPIB dan CBIB dalam kegiatan perikanan</li> <li>➤ Lemahnya kelembagaan pelaku usaha perikanan dalam mengakses permodalan dan pemasaran hasil produk</li> <li>➤ Lemahnya data kelautan dan perikanan serta informasi akses pasar</li> <li>➤ Kawasan pengembangan perikanan belum tertata dengan baik</li> </ul>
<b>Peluang ( OPURTUNITY )</b>	<b>Ancaman ( THREAT )</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tingginya permintaan pasar akan produk perikanan</li> <li>➤ Potensi perikanan masih belum tergarap secara maksimal</li> <li>➤ Adanya dukungan Pusat maupun Propinsi dalam pengembangan perikanan</li> <li>➤ Akses pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN</li> <li>➤ Berkembangannya teknologi perikanan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas</li> <li>➤ Regulasi pemerintah dalam penguatan usaha kecil menengah melalui dana KUR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penurunan daya dukung dan kualitas lingkungan perikanan dan ancaman serangan penyakit</li> <li>➤ Berkembangnya usaha budidaya dan industri pengolahan di Negara ASEAN</li> <li>➤ Perubahan iklim</li> </ul>

#### **4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi 1 dan misi 4, juga merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan jangka menengah yang hendak dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan adalah pada misi 1 “Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah” dan “Meningkatnya Kinerja Organisasi” dengan indikator kinerja menukung Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten dan Nilai Komponen Kinerja Organisasi. Pada misi 4 yaitu “Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan” dengan indikator kinerja pertumbuhan produktivitas komoditas di sektor perikanan yang merupakan pertumbuhan rata-rata dari komoditas unggulan Dinas Perikanan yaitu produksi perikanan budidaya, produksi benih ikan, produksi perikanan tangkap, produksi ikan olahan dan pemasaran produksi perikanan.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (T-C 25)

NO.	TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Akhir 2020	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA				
					TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	
1	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten		58.64	59.64	60.64	61.64	62.64
	1.1	Meningkatkan kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas Perikanan	39.59	40.59	41.59	43.09	44.59	46.09
2	Meningkatnya Kinerja Organisasi		Nilai Komponen Kinerja Organisasi		4.95	5.25	5.55	5.85	6.15
	2.1	Meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negera	Indeks profesionalitas ASN Dinas Perikanan	n/a	48.31	49.31	50.31	51.31	52.31
3	Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutan dan Perikanan		1.1	0.47	0.47	0.54	0.31
	3.1	Meningkatkan Produksi Ikan Lele	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Lele	641.48 ton	4.73	5.00	5.00	5.00	5.00
	3.2	Meningkatkan Produksi Ikan Nila	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Nila	297.71 ton	4.50	4.50	4.50	5.00	5.00
	3.3	Meningkatkan Produksi Ikan Gurame	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Gurame	22.13 ton	1.67	5.56	5.56	5.54	5.56
	3.4	Meningkatkan Produksi Ikan Mas	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Mas	95.73 ton	0.80	1.00	1.00	1.00	1.01
	3.5	Meningkatkan Produksi Ikan Patin	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Patin	626.57 ton	3.83	3.83	3.83	3.89	3.94

3.6	Meningkatkan Produksi Ikan Baung	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Baung	15.35 ton	0.33	2.47	2.47	2.41	2.48
3.7	Meningkatkan Produksi Ikan Lainnya	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Lainnya	11.98 ton	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
3.8	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Lele	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Lele	23.182.000 ekor	5.00	5.00	8.00	10.00	10.00
3.9	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Nila	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Nila	802.958 ekor	3.00	3.00	5.00	5.00	10.00
3.10	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Gurame	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Gurame	271.423 ekor	1.00	1.00	1.50	1.50	1.50
3.11	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Mas	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Mas	268.661 ekor	2.00	2.00	4.00	5.00	5.00
3.12	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Lainnya	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Lainnya	50.000 ekor	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3.13	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	198.71 ton	0.45	0.50	0.52	0.52	0.52
3.14	Meningkatkan Produksi Ikan Olahan	Persentase Peningkatan Produksi Ikan olahan	12.42 ton	4.83	4.99	5.05	5.15	5.17
3.15	Meningkatkan Produksi Ikan yang dipasarkan	Persentase Peningkatan Volume Produk Hasil Perikanan yang dipasarkan	13550.54 ton	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00



**5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah**

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan kebijakan. Adapun strategi dan kebijakan berdasarkan masing-masing misi sebagaimana tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (T-C 26)

VISI : Way Kanan Unggul dan Sejahtera			
MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	1. Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	1. Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perikanan	Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan SKPD
2. Meningkatnya Kinerja Organisasi	2. Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara	2. Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perikanan	Meningkatkan kinerja Apartur Sipil Negara yang ada dalam Dinas Perikanan
MISI IV : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur			
Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Meningkatkan Produksi Ikan Lele	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Lele	Peningkatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil dan Pendampingan Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Lele	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya
	Meningkatkan Produksi Ikan Nila	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Nila	Peningkatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil dan Pendampingan Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Nila	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Meningkatkan Produksi Ikan Mas	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Mas	Peningkatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil dan Pendampingan Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Mas	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya
	Meningkatkan Produksi Ikan Patin	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Patin	Peningkatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil dan Pendampingan Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Patin	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya
	Meningkatkan Produksi Ikan Baung	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Baung	Peningkatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil dan Pendampingan Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Baung	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Meningkatkan Produksi Ikan Lainnya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Lainnya	Peningkatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil dan Pendampingan Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Lainnya	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya
	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Lele	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Lele	Peningkatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil dan Pendampingan Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Lele	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya
	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Nila	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Lele	Peningkatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil dan Pendampingan Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Lele	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Gurame	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Lele	Peningkatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil dan Pendampingan Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Lele	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya
	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Mas	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Lele	Peningkatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil dan Pendampingan Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Lele	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya
	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Lainnya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Lele	Peningkatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil dan Pendampingan Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Lele	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya
	Meningkatkan Produksi Ikan Olahan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan , serta Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan
	Meningkatkan Produksi Ikan yang dipasarkan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan , serta Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan

## ANALISA SWOT

<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"><b>INTERNAL</b></div> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto; margin-top: 100px;"><b>EKSTERNAL</b></div>	<p style="text-align: center;"><b><u>STRENGTH</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Adanya regulasi yang mendukung pengembangan usaha di bidang perikanan seperti UU Perikanan, Perda Perangkat Daerah</li> <li>➤ Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dalam pengembangan bidang perikanan</li> <li>➤ Adanya SDM baik aparaturnya maupun pelaku usaha di bidang perikanan</li> <li>➤ Terdapat UPT BBI dan Unit Pembenihan untuk mendukung pengembangan usaha bidang perikanan</li> <li>➤ Memiliki Potensi Perairan yang cukup, seperti sungai, embung dan irigasi teknis</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b><u>WEAKNES</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Keterbatasan Sarana Prasarana dan Anggaran</li> <li>➤ Keterbatasan SDM Perikanan</li> <li>➤ Rendahnya kualitas SDM Aparatur maupun pelaku usaha</li> <li>➤ Rendahnya ketersediaan benih ikan unggul</li> <li>➤ Lemahnya Penerapan CPiB dan CBIB dalam kegiatan perikanan</li> <li>➤ Lemahnya kelembagaan pelaku usaha perikanan dalam mengakses permodalan dan pemasaran hasil produk</li> <li>➤ Lemahnya data kelautan dan perikanan serta informasi akses pasar</li> <li>➤ Kawasan pengembangan perikanan belum tertata dengan baik</li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b><u>OPURTUNITY</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tingginya permintaan pasar akan produk perikanan</li> <li>➤ Potensi perikanan masih belum tergarap secara maksimal</li> <li>➤ Adanya dukungan Pusat maupun Propinsi dalam pengembangan perikanan</li> <li>➤ Akses pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN</li> <li>➤ Berkembangannya teknologi perikanan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b><u>STRATEGI SO</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengembangan komoditas perikanan unggulan daerah berbasis kawasan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan</li> <li>➤ Peningkatan produksi, produktivitas dan perikanan yang berkelanjutan</li> <li>➤ Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan usaha perikanan</li> <li>➤ Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil produk perikanan</li> <li>➤ Peningkatan kualitas SDM perikanan dalam penguasaan teknologi perikanan</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b><u>THREAT</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penurunan daya dukung dan kualitas lingkungan perikanan dan ancaman serangan penyakit</li> <li>➤ Berkembangnya usaha budidaya dan industri pengolahan di Negara ASEAN</li> <li>➤ Perubahan iklim</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b><u>STRATEGI ST</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan pengawasan perairan umum berbasis masyarakat ( POKMASWAS )</li> <li>➤ Penguatan lintas sektoral dalam pengawasan lingkungan</li> <li>➤ Peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha perikanan</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b><u>STRATEGI WT</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penataan kawasan sentra perikanan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan</li> </ul>

## **BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

---

### **6.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui rencana kerja tahunan. Dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dengan capaian kinerja yang sudah ditetapkan. Penyusunan program kegiatan menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi dalam pelaksanaan pembangunan termasuk disektor perikanan. Guna mencapai tujuan dan sasaran tingkat daerah tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang upaya pencapaiannya dilaksanakan melalui 6 (enam) program sebagai berikut:

#### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan pada Dinas Perikanan yang terdiri dari meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran, kualitas sarana dan prasarana aparatur pendukung kegiatan, peningkatan kualitas disiplin aparatur dan kapasitas sumberdaya aparatur dan meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Dalam pencapaian tujuan program ini, maka dilaksanakan kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Terdiri dari sub kegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah;
- b. Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD;



- c. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
  - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Terdiri dari sub kegiatan :
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Koordinasi dan Penyusunan laporan akhir tahun SKPD;
  - c. Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD;
  - d. Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.
3. Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Terdiri dari sub kegiatan :
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
  - c. Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan.
4. Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
- Terdiri dari sub kegiatan :
- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - e. Fasilitas Kunjungan Tamu;
  - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Terdiri dari sub kegiatan :
- a. Pengadaan Mebel;
  - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdiri dari sub kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listrik;
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Terdiri dari sub kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Lainnya;
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

## **II. Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

Potensi Perikanan Tangkap di Kabupaten Way Kanan sangat bervariasi, mulai dari hulu hingga ke ilir, berbagai ikan pelagis dan demersal di sungai- sungai yang ada di way kanan. Permasalahan yang dihadapi pun cukup kompleks, diantaranya masih adanya alat tangk yang tidak ramah lingkungan/*IUU fishing*, rendahnya mutu hasil tangkapan sampai dengan kondisi stagnan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana karena kewenangan sudah berpindah ke provinsi bukan lagi dibawah kabupaten/kota. Berdasarkan kondisi tersebut, satu kegiatan yang mendukung Pengembangan Perikanan Tangkap di Kabupaten Way Kanan meliputi:

1. Sosialisasi nelayan tentang alat tangkap ramah lingkungan dan asuransi nelayan
2. Restocking ikan di perairan umum

Dalam pencapaian tujuan program ini, maka dilaksanakan kegiatan :

1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah kabupaten/kota

Terdiri dari sub kegiatan :

- a. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

### **III. Program Pengembangan Budidaya Perikanan**

Potensi perikanan budidaya di Kabupaten Way Kanan hanya budidaya ikan air tawar (lele, Nila, patin, mas, gurame). Saat ini kegiatan budidaya menghadapi beberapa masalah, mulai dari trend menurunnya produksi, Menurunnya daya dukung lingkungan hingga masalah penyakit dan kondisi balai-balai benih milik pemerintah justru beroperasi tidak optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, beberapa kegiatan yang mendukung pengembangan budidaya perikanan di Kabupaten Way Kanan meliputi:

1. Kegiatan Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil  
Terdiri dari sub kegiatan :
  - a. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil
  - b. Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil
  - c. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
  - d. Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
2. Penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota  
Terdiri dari sub kegiatan :
  - a. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan Pembudidaya Ikan  
Terdiri dari sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

#### **IV. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan**

Selain pengembangan perikanan budidaya dan pengembangan perikanan tangkap, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan juga dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Kabupaten/Kota mengingat keterbatasan anggaran, SDM dan Sarana prasarana yang dimiliki bila harus mengawasi seluruh wilayah perairan yang ada di Kabupaten Way Kanan. Oleh karena itu, strategi pengawasan terpadu dengan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang ada di Kabupaten Way Kanan.

Rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota.

Dalam pencapaian tujuan program ini, maka dilaksanakan kegiatan :

1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota

Terdiri dari sub kegiatan :

- a. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
- b. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

#### **V. Program Peningkatan Daya Saing Produk dan Konsumsi Ikan**

Dengan beragamnya produksi perikanan di Kabupaten Way Kanan, baik yang berasal dari penangkapan maupun budidaya, perlu didukung pengolahan, pemasaran dan peningkatan mutu untuk memperoleh nilai tambah dan peningkatan daya saing produk perikanan. Selain itu Dinas Perikanan perlu berperan aktif dalam mengurangi permasalahan stunting dan pemenuhan gizi sumber protein masyarakat. Untuk itu Dinas Perikanan melaksanakan beberapa

kegiatan yang mendukung pengolahan, pemasaran dan peningkatan konsumsi ikan masyarakat yang meliputi :

1. Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;  
Terdiri dari sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;  
Terdiri dari sub kegiatan :
  - a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3. Penyediaan dan penyaluran bahan baku industry pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota.  
Terdiri dari sub kegiatan :
  - a. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

## BAB. VII

# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

---

Pada bagian ini ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini indikator yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 7.1. berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (T-C 28)

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Nilai SAKIP Dinas Perikanan	39.59	40.59	41.59	43.09	44.59	46.09	46.09
2	Nilai Komponen Kinerja Organisasi	n/a	48.31	49.31	50.31	51.31	52.31	52.31
3	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Lele	4.25	4.73	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
4	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Nila	4.10	4.50	4.50	4.50	5.00	5.00	5.00
5	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Gurame	1.50	1.67	5.56	5.56	5.54	5.56	5.56
6	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Mas	0.72	0.80	1.00	1.00	1.00	1.01	1.01
7	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Patin	3.50	3.83	3.83	3.83	3.89	3.94	3.94
8	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Baung	0.24	0.33	2.47	2.47	2.41	2.48	2.48

9	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Lainnya	0.12	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
10	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Lele	4.43	5.00	5.00	8.00	10.00	10.00	10.00
11	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Nila	2.41	3.00	3.00	5.00	5.00	10.00	10.00
12	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Gurame	0.92	1.00	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50
13	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Mas	1.90	2.00	2.00	4.00	5.00	5.00	5.00
14	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Lainnya	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
15	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0.42	0.45	0.50	0.52	0.52	0.52	0.52
16	PersentasePeningkatkan Produksi Ikan olahan	4.50	4.83	4.99	5.05	5.15	5.17	5.17
17	Persentase Peningkatan Volume Produk Hasil Perikanan yang dipasarkan	4.17	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00



## BAB. VII

## PENUTUP

Untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan harus dimulai dari tahapan perencanaan yang baik dan cermat. Rencana strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hendaknya menjadi pedoman, arah kebijakan dan sekaligus alat ukur dalam evaluasi dan monitoring terhadap capaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Namun demikian, renstra bukanlah dokumen yang bersifat kaku dan terbatas, melainkan dokumen yang fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Apabila dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan terjadi perkembangan dan perubahan, baik dari faktor eksternal maupun internal, maka komponen dalam renstra mulai dari misi, program dan kegiatan maupun target indikator kinerja dapat diubah untuk menyesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi terkini yang harus dihadapi. Masukan dan saran yang membangun dari berbagai pihak akan sangat bermanfaat dalam penyusunan dimasa-masa yang akan datang.

Demikianlah dokumen Renstra ini disusun, tanpa dukungan anggaran yang memadai dan kerjasama seluruh pihak terkait, maka target yang ingin dicapai pada akhir periode akan sulit terwujud. Semoga dokumen Renstra ini bermanfaat, menuju pembangunan Perikanan Kabupaten Way Kanan lebih baik dari tahun ke tahun. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja renstra Dinas Perikanan ini.

Blambangan Umpu, 2021

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Way Kanan



Drs. KADARSYAH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690918 199003 1006

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan (T.C. 27)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Dua Capaian program dan Arah Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Beban Perolehan Daerah Pemanggang Jabat	Lokasi				
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)						
1. Mengembangkan Kualitas Administrasi Instansi SAKIP SKPD	1. Mengembangkan Kualitas Administrasi Instansi SAKIP SKPD	3 25 01	Uraian Pribadi Bidang Kelembagaan dan Perlakuan	Jumlah Dokumen dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Dokumen	4.000,000	3 Dokumen	8.800,000	3 Dokumen	12.000,000	3 Dokumen	13.000,000	3 Dokumen	13.000,000	3 Dokumen	65.800,000	Dinas Perikanan Kab. Way Kanan						
2. Meningkatkan Kinerja ASN	2. Meningkatkan Kinerja ASN	3 25 01	Uraian Pribadi Bidang Kelembagaan dan Perlakuan	Jumlah laporan pelaksanaan yang terakumulasi	3 Laporan	3.000,000	3 Laporan	3.800,000	3 Laporan	4.000,000	3 Laporan	4.000,000	3 Laporan	4.000,000	3 Laporan	22.300,000	Dinas Perikanan Kab. Way Kanan						
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	3 25 01	Uraian Pribadi Bidang Kelembagaan dan Perlakuan	Jumlah Dokumen RBA yang terakumulasi	1 Dokumen	2.000,000	1 Dokumen	2.800,000	1 Dokumen	3.000,000	1 Dokumen	3.000,000	1 Dokumen	3.000,000	1 Dokumen	15.300,000	Dinas Perikanan Kab. Way Kanan						
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	3 25 01	Uraian Pribadi Bidang Kelembagaan dan Perlakuan	Jumlah Dokumen Laporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Laporan	1.800,000	12 Laporan	1.650,000	12 Laporan	3.000,000	12 Laporan	3.000,000	12 Laporan	3.000,000	12 Laporan	15.150,000	Dinas Perikanan Kab. Way Kanan						
5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	3 25 01	Uraian Pribadi Bidang Kelembagaan dan Perlakuan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.800,000	1 Dokumen	1.650,000	1 Dokumen	2.000,000	1 Dokumen	2.000,000	1 Dokumen	2.000,000	1 Dokumen	13.150,000	Dinas Perikanan Kab. Way Kanan						
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	3 25 01	Uraian Pribadi Bidang Kelembagaan dan Perlakuan	Jumlah Dokumen dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen	1.800,000	12 Dokumen	1.965.257,655	12 Dokumen	2.064.040,058	12 Dokumen	2.064.040,058	12 Dokumen	2.064.040,058	12 Dokumen	11.900.228,319	Dinas Perikanan Kab. Way Kanan						
7. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	7. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	3 25 01	Uraian Pribadi Bidang Kelembagaan dan Perlakuan	Jumlah Dokumen dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14 Dokumen	1.800,000	14 Dokumen	1.987.667,158	14 Dokumen	2.054.640,255	14 Dokumen	2.054.640,255	14 Dokumen	2.054.640,255	14 Dokumen	11.885.528,319	Dinas Perikanan Kab. Way Kanan						
8. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	8. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	3 25 01	Uraian Pribadi Bidang Kelembagaan dan Perlakuan	Jumlah Dokumen dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	4.000,000	1 Dokumen	4.800,000	1 Dokumen	4.000,000	1 Dokumen	4.000,000	1 Dokumen	4.000,000	1 Dokumen	24.800,000	Dinas Perikanan Kab. Way Kanan						
9. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	9. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	3 25 01	Uraian Pribadi Bidang Kelembagaan dan Perlakuan	Jumlah Dokumen dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	1.800,000	1 Dokumen	1.650,000	1 Dokumen	3.000,000	1 Dokumen	3.000,000	1 Dokumen	3.000,000	1 Dokumen	15.150,000	Dinas Perikanan Kab. Way Kanan						
10. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	10. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	3 25 01	Uraian Pribadi Bidang Kelembagaan dan Perlakuan	Jumlah Dokumen dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	1.800,000	1 Dokumen	1.650,000	1 Dokumen	3.000,000	1 Dokumen	3.000,000	1 Dokumen	3.000,000	1 Dokumen	15.150,000	Dinas Perikanan Kab. Way Kanan						
11. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	11. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	3 25 01	Uraian Pribadi Bidang Kelembagaan dan Perlakuan	Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	90%	22.000,000	90%	24.200,000	90%	35.000,000	90%	35.000,000	90%	35.000,000	90%	230.200,000	Dinas Perikanan Kab. Way Kanan						
12. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	12. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	3 25 01	Uraian Pribadi Bidang Kelembagaan dan Perlakuan	Jumlah Dokumen dan evaluasi kinerja perangkat daerah	35 Orang	12.000,000	35 Orang	13.200,000	35 Orang	20.000,000	35 Orang	20.000,000	35 Orang	22.000,000	35 Orang	109.200,000	Dinas Perikanan Kab. Way Kanan						
13. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	13. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	3 25 01	Uraian Pribadi Bidang Kelembagaan dan Perlakuan	Jumlah Dokumen dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Orang	10.000,000	2 Orang	11.000,000	2 Orang	20.000,000	2 Orang	20.000,000	2 Orang	15.000,000	2 Orang	60.000,000	Dinas Perikanan Kab. Way Kanan						
14. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	14. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	3 25 01	Uraian Pribadi Bidang Kelembagaan dan Perlakuan	Jumlah Dokumen dan evaluasi kinerja perangkat daerah	0	10.000,000	0	10.000,000	0	15.000,000	0	15.000,000	0	15.000,000	0	70.000,000	Dinas Perikanan Kab. Way Kanan						
15. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	15. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	3 25 01	Uraian Pribadi Bidang Kelembagaan dan Perlakuan	Jumlah Dokumen dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen	99.000,000	12 Dokumen	108.000,000	12 Dokumen	126.000,000	12 Dokumen	141.000,000	12 Dokumen	148.700,000	12 Dokumen	806.300,000	Dinas Perikanan Kab. Way Kanan						
16. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	16. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	3 25 01	Uraian Pribadi Bidang Kelembagaan dan Perlakuan	Jumlah Dokumen dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 paket	5.000,000	1 paket	5.800,000	1 paket	5.000,000	1 paket	5.000,000	1 paket	5.000,000	1 paket	30.500,000	Dinas Perikanan Kab. Way Kanan						
17. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	17. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	3 25 01	Uraian Pribadi Bidang Kelembagaan dan Perlakuan	Jumlah Dokumen dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 paket	5.000,000	1 paket	5.800,000	1 paket	10.000,000	1 paket	12.000,000	1 paket	14.300,000	1 paket	61.500,000	Dinas Perikanan Kab. Way Kanan						







